

## DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, Indra. 2006. *Sistem Akuntansi Sektor Publik*, Edisi 2. Salemba Empat. Jakarta.
- DEPUTI IV BPKP. 2005. *Pedoman Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja (Revisi)*. BPKP. Jakarta.
- Ghozali, Imam. 2009. *Ekonometrika: Teori Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Herawati, Netty. 2011. Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Jambi. *Jurnal Penelitian Universitas Jambi*. (Online), Volume 13 No. 2, (diakses 27 September 2012). Jambi.
- Harjanti, Heti P. 2009. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Depok*. Tesis. UNPAD. Jawa Barat. Bandung.
- Julianto. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Kinerja SKPD di Pemkab Tebing Tinggi*. Tesis. USU. Sumatera Utara.
- Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- Kurniawan. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah di Wilayah IV Priangan*. Skripsi. UPI. Jakarta.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit ANDI. Yogyakarta.
- Muda, Taufik D. 2005. *Pengaruh Perencanaan Anggaran dan Pelaksanaan Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Sekretariat Kota Kotamadya Jakarta Selatan*. Disertasi. UNPAD. Bandung.
- Nina, Widiawati. 2009. *Pengaruh Penganggaran Berbasis Kinerja Terhadap Akuntabilitas Kinerja Terhadap Akuntabilitas Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi*. Tesis. UNPAD. Bandung.
- Nugroho, Yohanes A. 2011. *Olah Data dengan SPSS*. PT. Skripta Media Creative. Yogyakarta
- Pusat Pendidikan dan Pelatihan BPKP .2007. *Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Revisi)*. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No.13 Tahun 2006 Tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Pusdiklatwas BPKP.2007. *Akuntabilitas Instansi Pemerintah*. Edisi 5. Jakarta.

Putra. 2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja dan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja SKPD di Pemerintah Kabupaten Simalungun*. Tesis. Progran Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.Medan

Sugih Arti, A. 2010. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja terhadap Akuntabilitas Dinas Pendidikan Kota Depok*. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Gunadarma. Jakarta.

Sugiyono. 2007, *Metode Penelitian Bisnis*, Alfabeta. Bandung

Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Peimerintahan Daerah*. 2004. Direktorat Jenderal Otonomi Daerah.Jakarta

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 2004. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

Umar, Husein. 2003, *Metode Riset Bisnis*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Widyantoro, Ari E. 2009. *Implementasi Performance Based Budgeting : Sebuah Kajian Fenomologis*. Tesis. Program Pascasarjana Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang

Yusriati, 2008. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Mandailing Natal*. USU. Sumatera Utara.

Haspiarti, 2012. *Pengaruh Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kota Pare-Pare*. Unhas. Makassar.

Masyadani, 2015. *Pengaruh Kebijakan Penyusunan Anggaran, Penerapan Anggaran dan Belanja Daerah Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Asahan*. USU. Sumatera Utara.